



Informasi Strategis

Jumat, 05 Februari 2021

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Gedung AH Nasution Lt. 14**

BIDANG DALAM NEGERI

Kontak Tembak Yonif 400/BR dengan KKSB di Titigi Intan Jaya, Papua

1 FAKTA

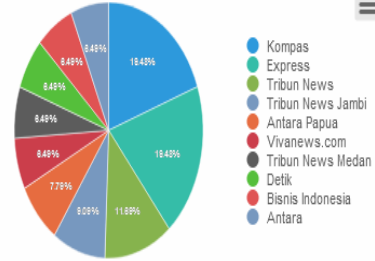
Pada tanggal 4 Februari 2021, dilansir Antara, Komandan Korem 173/PBB Brigjen TNI Iwan Setiawan mengatakan bahwa telah terjadi kontak tembak antara Yonif 400/BR dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Kamis pagi (4/2/2021). Dalam kontak tembak tersebut satu anggota KKSB meninggal.

MEDIA EXPOSURE

407 Berita Online

2.003.630 Cuitan Twitter

34 Posting Facebook



TINGKAT ANCAMAN KABUPATEN/KOTA



TINGKAT ANCAMAN PROVINSI

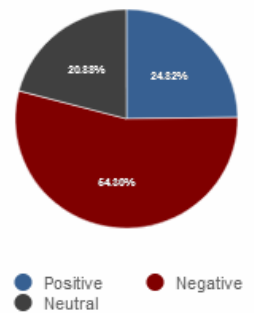


TINGKAT ANCAMAN NASIONAL



2 ANALISIS

Kontak tembak yang terjadi antara Yonif 400/BR dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Titigi, Intan Jaya, Papua, terjadi setelah Yonif 400/BR melakukan pengejaran terhadap KKSB yang sebelumnya telah melakukan penyerangan bersenjata di Pos Jaga Yonif 400/BR yang telah menyebabkan dua anggota Yonif 400/BR meninggal dunia akibat luka tembak. Sampai saat ini insiden kontak tembak tersebut belum ada laporan lebih lanjut terkait kondisi terakhir di lapangan. Diperlukan kewaspadaan tinggi personel TNI-Polri kemungkinan adanya aksi serangan balik KKSB terhadap aparat keamanan sebagai aksi balas dendam sebagai mana biasa terjadi sebelumnya.



3 DAMPAK

Keberhasilan personel TNI Yonif 400/BR menembak mati salah seorang anggota KKSB dalam kontak tembak tersebut, berdampak positif pada penegakan hukum terhadap kelompok separatis Papua.

4 SARAN

- Kemhan mendukung sinergitas TNI dan Polri melakukan pengejaran dan penangkapan KKSB-OPM yang telah melakukan serangkaian teror terhadap aparat keamanan dan warga sipil belakangan ini.
- Kemhan berkoordinasi dan mendukung TNI untuk membekali pengerahan pasukan di Papua dengan strategi, alat peralatan dan teknologi yang tepat, guna meminimalkan jatuhnya korban dan mempersempit ruang gerak KKSB-OPM, memisahkannya dari masyarakat sipil, memutus dukungan masyarakat setempat terhadap KKSB-OPM, dan akhirnya menumpas gerakan separatisme di Papua.

BIDANG DALAM NEGERI

Menteri Sekretaris Negara Sebut Presiden Jokowi Tidak Perlu Balas Surat AHY Soal Polemik Demokrat

1

FAKTA

Pada tanggal 4 Februari 2021, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan bahwa Istana sudah menerima surat dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Surat tersebut diantar langsung oleh Sekjen Partai Demokrat.

TINGKAT KERAWANAN PROVINSI



TINGKAT KERAWANAN NASIONAL



2

ANALISIS

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah menerima surat dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, tetapi pihak Istana tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai Demokrat yang semua-nya sudah diatur di dalam AD/ART. Sebelumnya AHY mengaku mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait dugaan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan partainya. AHY menyebut adanya dugaan keterlibatan orang dekat Jokowi dalam upaya kudeta tersebut. Belakangan, sejumlah politikus Demokrat juga menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggalang dukungan dan mengklaim mendapat restu dari Presiden Jokowi.

3

DAMPAK

Partai Demokrat tidak puas terhadap sikap pemerintah yang tidak menjawab suratnya dan dimungkinkan akan melakukan manuver politik lain.

4

SARAN

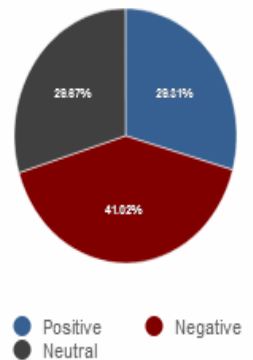
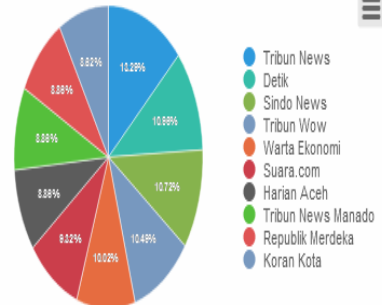
Kemhan berkoordinasi dengan Menko Polhukam untuk membangun komunikasi menindaklanjuti surat klarifikasi dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) guna menghindari terjadinya kegaduhan politik ditengah Indonesia sedang fokus menangani pandemi Covid - 19.

MEDIA EXPOSURE

2.211 Berita Online

1.785.163 Cuitan Twitter

139 Posting Facebook



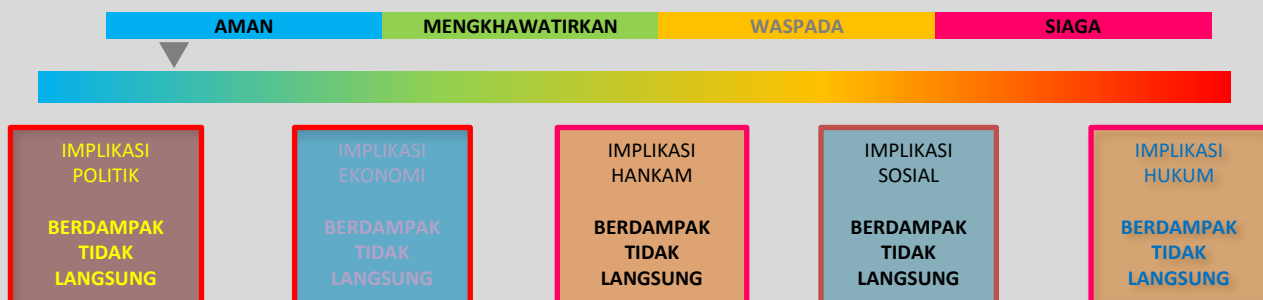
1

FAKTA/DATA

PBB Setujui Daftar Kandidat Jalankan Pemerintahan Transisi Libya Hingga Pemungutan Suara Tahun Ini

Utusan PBB untuk Libya, Stephanie Williams mengumumkan pembentukan 18 anggota Dewan Konsultasi Forum Dialog Libya, yang bertugas merancang mekanisme formal untuk memilih eksekutif sementara Libya. Misi Dukungan PBB untuk Libya (UNSMIL) menyampaikan bahwa dalam pemerintahan sementara ini ada 24 kandidat yang akan bersaing dalam Dewan Kepresidenan, satu presiden dan dua wakil presiden, sementara untuk posisi perdana menteri ada 21 kandidat. Mereka akan menjadi pemimpin eksekutif sementara Libya.

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL



2

ANALISA

Peserta perundingan terdiri dari tokoh regional dan suku hingga perwakilan dari faksi politik Libya telah menyetujui daftar kandidat untuk memimpin pemerintahan transisi. Pemerintah transisi akan mengawasi persiapan pemungutan suara yang bertujuan untuk mengakhiri satu dekade kekacauan dan konflik Libya. Kondisi yang tidak stabil ini telah membuat Libya terpecah dan menekan ekspor minyak yang menjadi tumpuan ekonomi negara itu. Namun, dikhawatirkan Kondisi ini masih bisa menimbulkan persaingan para kandidat untuk mendapatkan jabatan dengan cara yang dapat memicu pertempuran baru.

3

DAMPAK

Banyak pihak menyambut baik terobosan ini, dan mendorong semua pihak di Libya untuk berusaha keras membentuk pemerintahan interim agar secepatnya keluar dari krisis yang dapat berpengaruh dikawasan. Pemerintahan transisi dengan sendirinya akan diisi oleh para tokoh Libya yang ingin berbagi tanggung jawab bukan karena pembagian kekuasaan,

4

SARAN

Kemhan mendorong Kemlu untuk berdiplomasi dalam forum OKI dan PBB guna menyuarkan stabilitas keamanan kawasan dan perdamaian di kawasan Afrika, dengan tujuan untuk menghentikan segala intervensi negara-negara asing di Libya terutama antara pemerintah negara dan oposisi.

Kunjungan PM Malaysia dalam mempererat hubungan Malaysia dan Indonesia

1

FAKTA

Pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2021, Perdana Menteri Malaysia ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin, melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Indonesia sejak dilantik pada Maret 2020. Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengangkat sejumlah isu diantaranya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, kerja sama ekonomi dan perdagangan, perbatasan, dan pengaturan koridor perjalanan atau *'Travel Corridor Arrangement'*.



2

ANALISIS

Kunjungan PM Tan Sri Muhyiddin Yassin membawa tiga agenda penting, yaitu pembahasan dalam menghadapi Covid-19, dimana Indonesia telah memulai penyuntikan vaksin Sinovac, sementara Malaysia akan memulai penyuntikan vaksin Pfizer-BioNtech pada akhir Februari. Agenda kedua terkait penguatan ekonomi. Malaysia merupakan mitra dagang ke-5 terbesar bagi Indonesia dengan nilai perdagangan tercatat sebesar 16,5 miliar dolar AS pada tahun 2019, dan mitra investasi terbesar ke-6 dengan nilai sebesar 1,35 miliar dolar AS pada 2019. Agenda ketiga adalah peningkatan hubungan bilateral kedua negara meliputi masalah sengketa perbatasan, penguatan budaya, dan keamanan.



INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

IMPLIKASI SOSIAL

IMPLIKASI EKONOMI

IMPLIKASI HUKUM

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

3

DAMPAK

Meski relasi Indonesia dan Malaysia dianggap menjadi yang paling penting di Asia Tenggara, hubungan keduanya kerap mengalami pasang surut. Kunjungan ini salah satu bentuk diplomasi yang dapat memperkuat hubungan kedua negara kedepan, terlebih dengan masih banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan, diantaranya sengketa perbatasan.

4

SARAN

Kemhan mendorong Kemlu untuk memasukkan agenda penguatan kerjasama pertahanan dengan menindaklanjuti pembuatan DCA kedua negara.

INFO GLOBAL

SEKJEN PBB MENGUTUK KERAS TINDAKAN PENAHANAN AUNG SAN SUU KYI

1 FAKTA

Pada Senin, 01-02-2021 Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan dilansir *AFP* mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB mengutuk keras penahanan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint dan para pemimpin politik lainnya menjelang sesi pembukaan parlemen baru Myanmar, dan Kejadian ini menjadi pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar. Guterres juga menyerukan kepada militer Myanmar untuk menghormati keinginan rakyat dan mematuhi norma-norma demokrasi, dan menyelesaikan setiap masalah lewat dialog damai.

2 ANALISIS

Tindakan penahanan terhadap Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint dan para pemimpin politik di Myanmar merupakan tindakan dan upaya untuk mengubah hasil pemilu serta menghalangi transisi demokrasi yang diinginkan rakyat Myanmar, Kejadian ini menjadi pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar, dan semua pihak termasuk PBB dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah.



3 DAMPAK

Pengambilalihan kekuasaan di Myanmar oleh militer dikhawatirkan dapat berdampak pada perubahan sikap politik luar negeri, khususnya terkait isu kawasan Asean. Pemerintahan transisi yang sedang dipimpin kalangan militer ini akan tanpa sadar terjebak dalam skenario persaingan AS - China di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

Dikhawatirkan juga, Myanmar Akan merevisi berbagai kesepakatan yang menyangkut Laut China Selatan; Zone of Peace, Freedom and Neutrality [Zopfan]; serta South East Asia Nuclear Weapon Free Zone [SEANWFZ].

Hal yang patut dikhawatirkan adalah Myanmar berpotensi menolak menjadikan Asean sebagai rujukan politik luar negerinya dan berpaling ke kekuatan besar tertentu.

4 SARAN

Kemenhan mendorong Kemenlu untuk mengimbau Pemerintah Myanmar yang saat ini memegang tampuk kepemimpinan untuk menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, di antaranya komitmen pada hukum, Pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan menyelesaikan setiap permasalahan melalui dialog damai.